

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bekasi adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi ini merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km², dengan letak geografis: 106°48'28''–107°27'29'' Bujur Timur dan 6°10'6''–6°00'6'' Lintang Selatan. Batas Kota Bekasi antara lain: Batas Utara dan Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, Batas Selatan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, dan Batas Barat dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kota Bekasi merupakan salah satu penyangga kota metropolitan Jakarta. Hal tersebut menyebabkan jumlah penduduk dan mobilitas penduduk di kota ini terus meningkat. Banyaknya jumlah penduduk juga berbanding lurus dengan kebutuhan energi, pengurangan luas tutupan vegetasi dan meningkatnya limbah harian masyarakat. Polusi udara masih menjadi masalah terbesar di kota-kota besar dimana polutan yang ada di udara tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melakukan pemantauan kualitas udara. Particulate Matter (PM) 2,5 adalah partikel halus di udara yang ukurannya 2,5 mikron atau lebih kecil dari itu. Menurut penjelasan Department of Health New York, AS, PM 2,5 bisa mengurangi jarak pandang dan terlihat agak berkabut ketika jumlahnya tinggi. Makin tinggi nilai PM_{2,5}, maka makin buruk untuk kesehatan

manusia. PM 2,5 memiliki lebar sekitar 2 sampai 1,5 mikron. Ukurannya ini membuatnya 30 kali lebih kecil dibanding lebar rambut manusia. Ukuran kecil ini membuatnya bisa masuk hingga ke dalam paru-paru. Paparan PM 2,5 dalam waktu sebentar saja sudah cukup untuk menyebabkan masalah pada mata, hidung, tenggorokan, iritasi paru, batuk, bersin, pilek, dan napas pendek. Bekasi mencatat rata-rata kualitas udara terburuk di seluruh wilayah Jabodetabek dengan 58 persen hari dalam sebulan PM_{2,5} ada di atas angka 100, atau dengan kata lain masuk kategori Risiko Tinggi.

Dalam laporan Air Quality Life Index (AQLI) bulan Juni 2022 itu disebutkan, hampir seluruh negara di Asia Tenggara dianggap memiliki tingkat polusi tidak aman. Masa pandemi Covid-19 rupanya tidak banyak membuat perubahan signifikan dalam menurunkan pencemaran udara di sejumlah kota besar seperti; Kota Mandalay; Hanoi; dan Jakarta. Juru Kampanye Iklim dan Energy Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu menyampaikan bahwa cara sederhana mengatasi pencemaran lintas batas adalah melalui ketaatan pemerintah menjalankan putusan majelis hakim atas gugatan mengenai kualitas udara, hanya saja pemerintah belum menjalankan putusan tersebut dengan optimal untuk mengendalikan pencemaran udara. Salah satu tugas pemerintah yaitu menangani polusi yang setiap harinya semakin buruk, dengan adanya hutan kota sebagai resapan dipusat Kota Bekasi, yaitu Hutan Kota Patriot Bina Bangsa menjadi kunci untuk menangani polusi udara sebagai Ruang Terbuka Hijau yang mumpuni artinya Ruang Terbuka Hijau yang terawat. Jika hutan kota tidak dirawat maka akan

mati dan tidak berfungsi pada ketentuannya yaitu sebagai resapan polusi udara, serta banyak menimbulkan masalah didalamnya.

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu kesatuan ekosistem hutan memiliki banyak manfaat serbaguna bagi umat manusia, karena itu keberadaan hutan wajib dijaga kelestariannya, serta dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sebagai kesatuan ekosistem hutan memiliki fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Hutan tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan berperan dalam menyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Administrasi pembangunan merupakan sistem administrasi yang berorientasi pada tindakan yang berorientasi pada tujuan, di mana terdapat proses mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan politik, ekonomi

dan sosial yang progresif.¹ Hal ini berperan sebagai sarana instrumental untuk mendefinisikan, mengkonsolidasikan, dan melaksanakan tujuan nasional, terutama di negara berkembang. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan kewenangan administratifnya untuk mencapai tugas pembangunan nasional dengan merumuskan, menyelenggarakan, dan melaksanakan program aksi berskala kecil hingga besar.

Efektivitas administrasi pembangunan sendiri dipengaruhi oleh struktur dan sistem yang berdaya, sehingga mampu mengelola segala tantangan dan tekanan oleh kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan perencanaan yang tepat, pemanfaatan sumber daya secara optimal, tenaga terampil, akuntabilitas sumber daya manusia, kemandirian dan *digital capabilities*. Salah satu penerapan administrasi pembangunan di Indonesia adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembangunan hutan kota di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pembangunan hutan kota merupakan komponen penting dari masyarakat yang berkelanjutan, mengingat hutan kota sendiri memberi manfaat yang luas dan beragam. Terdapat beberapa fungsi hutan kota bagi masyarakat, yaitu sebagai infrastruktur alami dalam pengelolaan air hujan, mengurangi efek *urban heat island*, habitat satwa, hingga sarana rekreasi *outdoor* masyarakat. Keberhasilan suatu implementasi pembangunan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti muatan kebijakan, kondisi

¹ Edward Weidner, The Idea of Development Administration. In: Edward Weidner (ed.) Development Administration in Asia (New York: 1962)

sosial, politik, ekonomi, hingga partisipasi publik. Hal ini sangat penting mengingat pembangunan oleh pemerintah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga masyarakat harus mendapatkan informasi terkini tentang pembangunan tersebut. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa partisipasi publik merupakan bagian integral dari administrasi pembangunan unsur penting dari pembangunan masyarakat dan demokrasi.

Pembangunan hutan kota di Kota Bekasi merupakan bagian dari komponen Ruang Terbuka Hijau (RTH) daerah sebagaimana tercantum dalam RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa penyediaan RTH di Kota Bekasi sebesar 30% dari luas wilayah, dengan RTH privat sebesar 10% dan RTH publik sebesar 20%. Namun berdasarkan kondisi eksisting realisasi RTH publik hanya mencapai 13-14%, termasuk penyediaan hutan kota. Terdapat beberapa masalah yang menjadi tantangan dalam pembangunan hutan kota, seperti pertumbuhan penduduk, meningkatnya sektor perdagangan dan jasa, kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, pembangunan kawasan permukiman dan industri, dan lainnya. Dukungan masyarakat sendiri sangat penting mengingat peran masyarakat dibutuhkan dalam setiap rencana pembangunan, baik pada tingkat perencanaan, implementasi hingga evaluasi pembangunan.

Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah ikut menciptakan RTH atau ruang terbuka hijau di lingkungan sekitarnya dalam bentuk pekarangan maupun taman di areal pemukiman. Selain itu masyarakat juga berkewajiban

untuk merawat dan menjaga ruang terbuka yang sudah ada. RTH sendiri jika dimanfaatkan dengan baik dapat berfungsi secara estetis, hidrologis, klimatologis, protektif maupun sosial budaya².

Sementara menurut Van Dill En kualitas suatu RTH berhubungan dengan kesehatan penghuni pemukiman sekitar RTH itu sendiri.³ RTH sendiri merupakan unsur utama dalam tata ruang kota. Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang⁴ RTH harus dibangun di antara struktur bangunan sebagai pelunak maupun penyejuk lingkungan. Pada prinsipnya, RTH diciptakan agar dapat menekan efek negatif yang ditimbulkan dari padatnya aktifitas perkotaan, seperti penurunan tingkat peresapan air, polusi dan peningkatan temperatur. Semakin sedikit jumlah RTH akan berakibat fatal, yaitu naiknya suhu bumi dan perubahan cuaca yang berakibat pada pemanasan global. Saat ini eksistensi RTH semakin berkurang dikarenakan adanya alih fungsi lahan RTH menjadi lahan pemukiman maupun perkantoran, adanya penebangan pohon-pohon di daerah perkotaan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat juga dan tidak diikuti dengan upaya penanaman kembali dengan pohon yang baru berdampak juga pada berkurangnya RTH.

Kota Bekasi memiliki wilayah yang relatif datar dan berbatasan langsung dengan provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia. Potensi

² Elis Hastuti, Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perumahan Sebagai Bahan Revisi SNI 03-1733- 2004, dalam Jurnal Standarisasi. Vol. 13 No.1 (2011, hal. 35-44)

³ Antara, I.G.Y.dkk, Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Tata Ruang Kota Tabanan. Bali: Skripsi Jurusan Pendidikan Geografi, Undiksha Singaraja (2009)

⁴ Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan. Bogor. Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian, (2006), www.penataruang.nettarumakalah.bnpp.co.id

daerah Kota Bekasi menyebabkan perkembangan kota menuju daerah perdagangan, jasa serta industri. Karena letak Kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan Ibukota menyebabkan datangnya arus urbanisasi yang signifikan dari masyarakat yang ingin mengadu nasib di ibukota dan ini berdampak pada berkurangnya areal lahan RTH yang dialihfungsikan menjadi pemukiman penduduk yang semakin meluas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa diperlukan sebuah kajian mengenai bagaimana implementasi kebijakan Pembangunan Hutan Kota di Kota Bekasi, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pembangunan Hutan Kota di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Tahun 2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan hutan kota di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan hutan kota di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas oleh penulis, maka yang akan menjadi tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan hutan

kota di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan hutan kota di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Kemudian mengetahui keterlibatan masyarakat yang mendiami sekitar dan di dalam kawasan hutan untuk turut serta memberdayakan sumber daya hutan yang ada.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan untuk memperkaya ilmu sosial khususnya ilmu perencanaan wilayah serta ekologi lingkungan dalam hal ini mengenai tata ruang kota, penataan wilayah, implementasi kebijakan pembangunan, serta partisipasi masyarakat dan hasil kajian diharapkan dapat dijadikan referensi guna penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pembangunan hutan kota.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengelola dan pemerintah setempat dalam hal pemanfaatan hutan kota di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, serta sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana S.AP.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

BAB I ini penulismenguraikan Bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, serta sistematika penulisan yang merupakan pendahuluan dalam skripsi atau pada dasarnya merupakan bab perkenalan. Dalam penelitian ini, BAB I menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi di tempat penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

BAB II penulismenguraikan studi terdahulu, konsep dan teori dan alur fikir penelitian. BAB II secara keseluruhan berisi mengenai landasan teoritis dalam skripsi untuk memberikan konsep yang jelas terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB III ini penulismenguraikan metode penelitian yang menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV berisi mengenai hasil temuan penelitian berdasarkan pengolahan dan analisis data yang disesuaikan dengan urutan rumusan permasalahan penelitian serta pembahasan dari hasil temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V ini penulismenguraikan kesimpulan terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus memberikan saran yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Bagian akhir secara berurutan terdiri dari:

1. Daftar Pustaka
2. Lampiran-Lampiran
3. Dokumentasi

